

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Investor Daily

Wilayah Berita : BPK Jateng

Halaman 8

BPK Siapkan Hotline Aduan Penyimpangan Dana Desa

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyiapkan saluran dan hotline bagi warga yang melaporkan penyimpangan penggunaan dana desa.

Menemukan banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Jateng. Penyimpangan itu bahkan terjadi mulai dari perencanaan pengelolaan keuangan dana, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo mengungkapkan, dalam perencanaan pengelolaan keuangan dana desa misalnya, pihaknya menemukan penyimpangan ada ketidakjelasan rencana anggaran biaya dari pemerintah-pemerintah desa.

Rencana anggaran biaya sebuah pekerjaan disusun hanya berdasarkan harga indeks kabupaten, bukan berdasar data harga pasar terdekat dari desa. Kemudian saat pengadaan barang dan jasa, menggunakan dana transfer yang tidak sesuai ketentuan.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atas barang dan jasa juga belum melakukan negosiasi yang dituangkan dalam berita acara, khususnya untuk transaksi antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta.

"Tak hanya itu, dalam pelaksanaan, ada pekerjaan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya. Ada kurang spek, volume pengerjaan, dan kemahalan harga. Dalam penatausahaan, pembukuan pengelolaan keuangan desa juga kurang tertib. Kadang pelaporannya telat, bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali ke pemerintah daerah untuk direkap menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," ujar Hery.

Dalam kegiatan *workshop* "Mekanisme Pemberian Opini Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Desa" dengan awak media, kemarin, Hery mengatakan, sejak tahun lalu, pihaknya sudah mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan desa di Jawa Tengah. Namun belum di semua desa, baru sampel di 120 desa di empat kabupaten, yakni Temanggung, Jepara, Grobogan, dan Brebes.

"Di tiap kabupaten itu, kami ambil sampel 30 desa. Meski tidak banyak, tapi kami yakin permasalahan pengelolaan keuangan di desa lain di Jateng, juga sama. Rata-rata permasalahannya seperti itu, lemah

pengendalian," tambah Hery.

Sampel Desa

Pihaknya memiliki keterbatasan waktu jika harus melakukan pemeriksaan di semua desa di Jawa Tengah. Menurut dia, lebih baik pihaknya mengambil sampel pemeriksaan di sebagian desa dan kemudian memperbaiki sistem pengelolaan dana desa yang masih lemah dan belum sesuai ketentuan, bersama pemerintah daerah, provinsi, serta pusat.

Dengan demikian, desa lain akan mengikuti pembenahan sistem tersebut. "Seperti, sistem pengawasannya diperkuat, *chanel* pengawasan juga disediakan. Ada *chanel* atau *hotline* pengaduan jika publik mengetahui penyimpangan," tandas Hery.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jateng juga mencatat ada 25 kepala desa di Jateng maupun perangkat yang diduga menyalahgunakan dana desa tahun ini. Dari jumlah itu, 14 di antaranya di Purworejo dan 11 lainnya tersebar di sejumlah kabupaten di Jateng, antara lain di Pati, Purbalingga, Batang, Kebumen, dan Kendal.

Asintel Kejati Jateng Hendrik P mengatakan, dugaan penyalahgunaan merupakan temuan Kejaksaan Negeri serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Nominal anggaran yang diduga diselewengkan tak terlalu besar, kisaran Rp 20-an juta. Dari 14 temuan di Purworejo, penyelewengan terbanyak dilakukan berupa pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, dana ditilap kades, *mark up* anggaran, *mark up* jumlah barang, dan belanja fiktif.

Penyalahgunaan ini dilakukan lantaran ada celah aturan yang dimanfaatkan sebagian kades nakal. Sementara dugaan penyelewengan di 11 desa lainnya, masih diselidiki.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, peningkatan anggaran dana desa untuk Jateng pada 2015-2017, yakni Rp 2,2 triliun, Rp 5 triliun, dan Rp 6,3 triliun. Dari 7.809 desa di Jateng, per desa rata-rata menerima Rp 800 juta. Ganjar membenarkan, jika pemeriksaan sampel oleh BPK di 120 desa pada empat kabupaten, yaitu Brebes, Grobogan, Temanggung, dan Jepara, ada indikasi penyimpangan laporan pertanggungjawaban. (K23, H81-50)